

Inovasi Birokrasi Adaptif: Strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mewujudkan Good Governance Pasca-Pandemi

Sumiati¹, Ahmad Danil², Ardan³, Inka Nusamuda Pratama⁴

^{1,2,3}Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

e-mail: inka.nusamuda@ummat.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis inovasi dalam birokrasi yang adaptif yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah pandemi COVID-19 sebagai cara untuk mencapai tata kelola yang baik. Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek, termasuk digitalisasi layanan publik, perubahan peraturan, kerjasama antara berbagai pihak, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta evaluasi dan pemantauan kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi layanan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga. Selain itu, revisi peraturan dan prosedur internal memberikan kemampuan untuk beradaptasi di masa krisis. Kerjasama antaraktor menghasilkan kebijakan yang lebih menyeluruh dan sesuai konteks, sementara penguatan kapasitas SDM dan evaluasi rutin memastikan bahwa karyawan dapat beradaptasi dan kebijakan tetap relevan. Secara keseluruhan, pendekatan birokrasi adaptif di NTB meningkatkan kualitas layanan publik, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat, serta menjadi dasar yang penting bagi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi krisis di masa yang akan datang.

Kata kunci: Inovasi Birokrasi, Good Governance, Kolaborasi Multi-Aktor, Evaluasi Kebijakan, Nusa Tenggara Barat

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan global yang memengaruhi banyak aspek kehidupan, terutama di bidang kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan. Setiap tingkatan pemerintahan harus menghadapi keadaan yang memerlukan respons yang cepat, fleksibel, dan kreatif. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang merupakan salah satu area penting di Indonesia, harus mengatasi tantangan tambahan karena keadaan geografis sebagai kepulauan dan kurangnya infrastruktur, yang memerlukan strategi kebijakan yang spesifik dan tepat guna. Birokrasi di NTB harus beradaptasi dengan cepat agar layanan publik dapat tetap berjalan dengan baik. Situasi ini menuntut inovasi dalam birokrasi yang fleksibel sebagai strategi utama dalam menangani dampak dari pandemi. Keberhasilan adaptasi ini sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan, tenaga kerja, dan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana inovasi birokrasi yang adaptif diimplementasikan dengan baik di NTB setelah masa pandemi (Salsabila & Darumurti, 2023).

Inovasi birokrasi yang adaptif adalah ide yang menggarisbawahi kemampuan birokrasi dalam menghadapi perubahan lingkungan dengan cara yang fleksibel dan kreatif. Birokrasi yang adaptif bukan hanya mengikuti aturan yang sudah ada; namun, ia juga bisa mengubah kebijakan serta cara kerja sesuai dengan situasi yang terus berubah. Di Indonesia, semangat inovasi dalam birokrasi ini didorong oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 mengenai Desain Besar Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menekankan pentingnya perubahan cara berpikir dan budaya kerja pegawai untuk menuju birokrasi yang profesional, mudah beradaptasi, dan fokus pada pelayanan publik. Aturan ini menjadi dasar normatif bagi

pemerintah daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam mengembangkan inovasi birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman yang berubah. (Katharina, 2021).

Tata kelola pemerintahan yang baik berfokus pada nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi semakin penting pascapandemi, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih responsif dan andal. Pemerintah Provinsi NTB menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan tuntutan layanan yang cepat dengan kebutuhan akan prosedur yang akuntabel. Dengan menerapkan inovasi birokrasi adaptif, pemerintah dapat menyelaraskan kebijakannya dengan kondisi lapangan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi, pemantauan berbasis data, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan publik (Ramadhan, 2024).

Salah satu langkah nyata yang diambil oleh pemerintah NTB untuk menerapkan birokrasi yang adaptif adalah dengan melakukan digitalisasi pada layanan administrasi publik. Proses digitalisasi ini mencakup berbagai layanan seperti perizinan, pembayaran, pelaporan, serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya digitalisasi, birokrasi dapat mengurangi keperluan untuk interaksi langsung, yang terbatas selama masa pandemi, dan pada saat yang sama meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam layanan. Di samping itu, pemanfaatan platform digital juga membuat monitoring dan evaluasi kebijakan bisa dilakukan secara real-time, sehingga pemerintah dapat membuat keputusan yang berbasis data dengan cepat dan tepat (Yusri & Jufri, 2023).

Selain dari digitalisasi, inovasi dalam birokrasi yang adaptif juga mencakup perubahan pada regulasi dan prosedur internal. Pemerintah Provinsi NTB melakukan penyesuaian pada beberapa kebijakan agar lebih fleksibel dalam menghadapi krisis, termasuk pelonggaran prosedur administrasi dan penyederhanaan cara pelayanan publik. Perubahan ini tidak mengurangi tanggung jawab, tetapi memastikan bahwa kebijakan tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian pada regulasi juga melibatkan peningkatan kerja sama antar-lingkungan birokrasi, sehingga respons terhadap berbagai masalah yang kompleks bisa dilakukan dengan lebih cepat dan terintegrasi (Purborini & Ramadhan, 2024).

Pendekatan kerja sama menjadi aspek penting dalam inovasi birokrasi yang dapat beradaptasi. Pemerintah NTB melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan. Kerja sama ini memungkinkan terciptanya solusi yang lebih menyeluruh dan sesuai konteks, karena kebijakan dibuat berdasarkan masukan dari berbagai sumber yang paham mengenai kondisi di lapangan. Pendekatan yang melibatkan banyak pihak ini juga meningkatkan akuntabilitas, karena setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan inovasi.

Penggunaan teknologi digital berperan sebagai salah satu kunci untuk kesuksesan birokrasi yang dapat beradaptasi di NTB. Teknologi ini memudahkan akses cepat terhadap informasi, koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan transparansi dalam proses administrasi. Penerapan e-government dan sistem informasi manajemen memungkinkan pemerintah memantau kebijakan secara langsung dan mempercepat pengambilan keputusan. Hal ini memudahkan pemerintah dalam mendeteksi masalah lebih awal dan merancang intervensi yang tepat. Selain itu, penggunaan teknologi juga mendorong partisipasi publik lewat platform digital, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan (Hidayat, 2025).

Pemerintah NTB juga menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung birokrasi yang dapat beradaptasi. Prioritas diberikan pada peningkatan kualitas

pegawai melalui pelatihan, workshop, dan program pengembangan profesional agar mampu mengatasi kompleksitas tugas di era pasca-pandemi. Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan beradaptasi, dan kreativitas akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kebijakan dan prosedur, serta dapat menjalankan layanan publik yang efektif. Penguatan sumber daya manusia ini menjadi dasar utama untuk keberhasilan inovasi birokrasi adaptif di tingkat provinsi (Sinaga et al., 2025).

Evaluasi dan pemantauan adalah langkah penting dalam pelaksanaan birokrasi yang adaptif. Pemerintah NTB melakukan pengawasan secara rutin untuk mengukur efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan. Proses evaluasi ini mencakup pengumpulan data kinerja, analisis dampak terhadap masyarakat, serta penentuan tantangan yang muncul. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan menyesuaikan strategi pelaksanaan agar tetap sejalan dengan perubahan sosial-ekonomi pasca-pandemi. Evaluasi yang berkelanjutan memastikan inovasi birokrasi dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang berubah (Amnah et al., 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa inovasi dalam birokrasi yang adaptif adalah strategi utama bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk mencapai tata kelola yang baik setelah pandemi. Implementasi inovasi, yang mencakup digitalisasi layanan, penyesuaian peraturan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kerjasama antara berbagai pihak, tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Diharapkan bahwa pendekatan yang adaptif ini akan menjadi dasar untuk pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan kokoh dalam menghadapi krisis di masa yang akan datang (Elza, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk menganalisis bagaimana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimplementasikan inovasi birokrasi yang dapat beradaptasi setelah pandemi COVID-19. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan evaluasi berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, laporan dari pemerintah, dan publikasi resmi mengenai inovasi birokrasi, prinsip pemerintahan yang baik, serta pengelolaan yang adaptif di tingkat daerah. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian ditelaah dengan seksama untuk menemukan strategi, praktik, dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah NTB dalam melaksanakan kebijakan yang responsif, yang mencakup digitalisasi layanan, pembaruan regulasi, kerjasama antara berbagai pihak, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik inovasi birokrasi yang adaptif, serta menyusun ringkasan temuan yang relevan untuk memperkuat prinsip pemerintahan yang baik pasca-pandemi (Mustari et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan berbagai inovasi dalam birokrasi yang responsif setelah pandemi COVID-19. Salah satu langkah penting yang diambil adalah mengubah layanan publik menjadi digital, yang termasuk perizinan, laporan, pembayaran, dan komunikasi antara pemerintah serta masyarakat. Perubahan ini membuat layanan tetap tersedia walaupun interaksi secara langsung dibatasi (Darumurti et al., 2023). Di samping itu, pemerintah NTB mengubah aturan dan prosedur internal, yang meliputi penyederhanaan cara pelayanan publik dan pelonggaran prosedur administratif agar lebih mudah menyesuaikan dengan situasi krisis. Pemerintah juga mendorong kerjasama antara banyak pihak dengan melibatkan kabupaten/kota, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Fokus juga diberikan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan profesional, sehingga pegawai menjadi lebih adaptif,

inovatif, dan responsif terhadap perubahan (Sulastrri & Permatasari, 2023). Selain itu, dilakukan evaluasi dan pemantauan rutin untuk menilai seberapa efektif kebijakan tersebut dan menyesuaikan strategi pelaksanaan agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 1. Strategi Inovasi Birokrasi Adaptif di NTB

Strategi	Bentuk Implementasi	Dampak Utama
Digitalisasi Layanan	E-perizinan, e-payment, pengaduan online	Efisiensi, transparansi, partisipasi publik
Revisi Regulasi	Penyederhanaan prosedur, relaksasi administrasi	Fleksibilitas, efektivitas kebijakan
Kolaborasi Multi-Aktor	Libatkan pemerintah kab/kota, swasta, akademisi, masyarakat	Solusi lebih holistik, akuntabilitas
Penguatan SDM	Pelatihan, workshop, pengembangan profesional	Pegawai adaptif dan inovatif
Evaluasi & Monitoring	Pemantauan kinerja, analisis dampak, penyesuaian kebijakan	Kebijakan tetap relevan dan responsif

Sumber: Diolah dari *Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (Diskominfotik NTB), 2024*.

Tabel di atas menunjukkan lima pendekatan utama dalam inovasi birokrasi yang fleksibel, seperti yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), beserta bentuk pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkannya. Pertama, digitalisasi layanan, terlihat melalui e-perizinan, pembayaran elektronik, dan pengaduan secara daring, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Kedua, perubahan regulasi dengan menyederhanakan prosedur dan merelaksasi administrasi mendorong kebijakan menjadi lebih fleksibel dan efektif. Ketiga, kolaborasi berbagai pihak yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif serta meningkatkan tingkat akuntabilitas. Keempat, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dilakukan lewat pelatihan, lokakarya, dan pengembangan profesional yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai yang inovatif dan mampu beradaptasi. Terakhir, evaluasi dan pemantauan melalui pengawasan kinerja, analisis dampak, dan penyesuaian kebijakan memastikan bahwa kebijakan itu tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat (Sumber: Diolah dari data Pemerintah Provinsi NTB, 2025).

Implementasi digitalisasi dalam layanan publik telah menjadi salah satu fondasi utama bagi inovasi birokrasi yang adaptif di NTB. Sekarang, layanan administrasi seperti izin, laporan, pembayaran, dan pengaduan dapat diakses secara daring melalui platform digital. Dengan adanya digitalisasi, proses layanan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih transparan karena setiap tahap dapat dipantau secara langsung. Masyarakat kini lebih mudah memberikan masukan dan melaporkan masalah, sehingga partisipasi publik menjadi lebih tinggi. Di samping itu, digitalisasi membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan yang berbasis data, memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap perubahan kebutuhan warga.

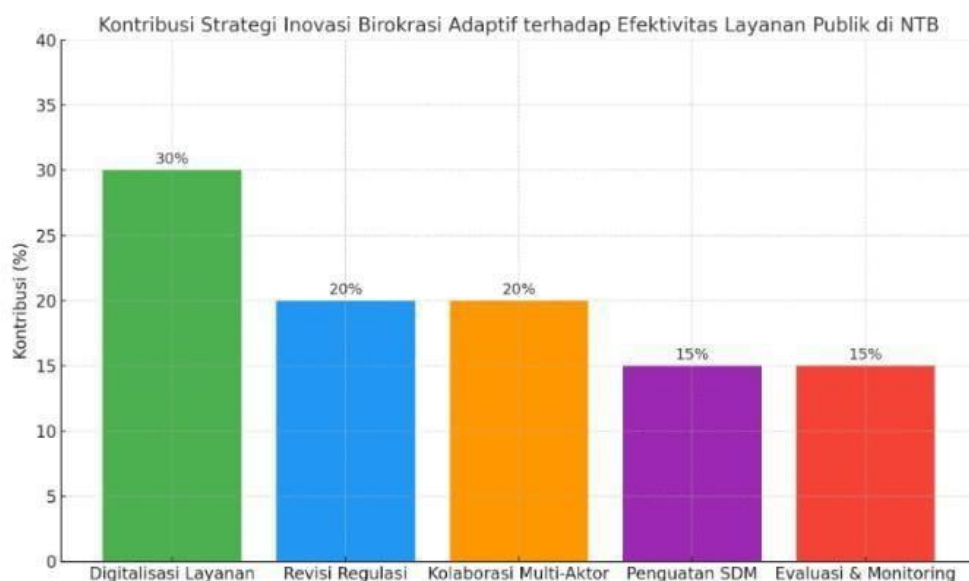
Tabel 2. Penggunaan Digitalisasi Layanan Publik di NTB

Layanan Publik	Sebelum Digitalisasi	Sesudah Digitalisasi	Peningkatan (%)
Perizinan	40% proses online	95% proses online	55%
Pelaporan Aduan	30% online	85% online	55%

Pembayaran Pajak	25% online	80% online	55%
Komunikasi Publik	20% digital	75% digital	55%

Tabel di atas menunjukkan bagaimana penerapan digitalisasi dalam layanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebelum dan setelah dilaksanakan. Untuk layanan perizinan, proses yang dilakukan secara online meningkat dari 40% menjadi 95%, sedangkan pelaporan aduan meningkat dari 30% menjadi 85%. Dalam hal pembayaran pajak, digitalisasi menyebabkan kenaikan dari 25% menjadi 80%, dan komunikasi publik juga naik dari 20% menjadi 75%. Secara keseluruhan, semua layanan menunjukkan peningkatan rata-rata 55%, yang menunjukkan efisiensi, kemudahan akses, serta partisipasi publik yang lebih baik sebagai akibat positif dari transformasi digital pada layanan publik di NTB.

Diagram 1: persentase kontribusi masing-masing strategi birokrasi adaptif terhadap efektivitas layanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber: Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025

Diagram di atas menggambarkan bahwa perubahan dalam regulasi dan prosedur internal berfungsi sebagai strategi adaptif yang memberikan fleksibilitas saat menghadapi krisis. Penyederhanaan dalam proses administrasi dan pelanggaran aturan memungkinkan pemerintah untuk cepat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi tanggung jawab. Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, karena setiap unit birokrasi memiliki peran yang terdefinisi dan saling terkait dalam pengambilan keputusan.

Kerjasama antara berbagai aktor juga merupakan aspek penting. Dengan melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih relevan dan menyeluruh. Cara ini juga mendorong akuntabilitas karena setiap pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan beragam pihak juga merangsang inovasi, karena ide dan praktik terbaik bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan layanan publik.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mendukung birokrasi yang fleksibel. Dengan mengikuti pelatihan, workshop, dan program peningkatan profesional, pegawai negeri dapat lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan dalam prosedur dan memaksimalkan penggunaan teknologi digital. Sumber daya manusia yang terampil

dan mudah beradaptasi memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Di samping itu, evaluasi dan pemantauan yang terus menerus memastikan bahwa inovasi dalam birokrasi tetap sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi setelah pandemi. Pemerintah NTB melakukan pemantauan secara teratur terhadap efektivitas kebijakan, dengan memanfaatkan data kinerja dan analisis dampak sebagai dasar untuk menyesuaikan strategi. Proses evaluasi ini membantu birokrasi untuk lebih responsif terhadap perubahan, memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

KESIMPULAN

Inovasi birokrasi yang fleksibel yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah pandemi COVID-19 terbukti menjadi cara yang efektif untuk mencapai pemerintahan yang baik. Terdapat lima strategi utama yang menjadi fokus digitalisasi layanan, perubahan regulasi, kolaborasi antara berbagai aktor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi dan pemantauan. Semua ini secara bersama-sama meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam layanan publik. Sebagai contoh, digitalisasi layanan publik mempermudah proses perizinan, pembayaran, pelaporan, dan komunikasi publik secara online. Hal ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Perubahan regulasi dan prosedur internal memberikan kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi krisis, sedangkan kolaborasi dari berbagai pihak memastikan kebijakan yang lebih menyeluruh dan sesuai konteks.

Keberhasilan inovasi birokrasi yang fleksibel di NTB sangat dikaitkan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan evaluasi secara berkala. Pelatihan, lokakarya, dan program pengembangan profesional dapat membantu pegawai menjadi lebih inovatif dan adaptif dalam mengikuti kebijakan baru serta memanfaatkan teknologi digital. Pemantauan dan evaluasi kinerja menjaga agar kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memperkuat akuntabilitas. Secara keseluruhan, pendekatan yang fleksibel ini membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas layanan, dan menjadi dasar penting untuk pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu bertahan menghadapi krisis di masa depan.

REFERENSI

- Amnah, W. Z., Afni, S., Ningsih, W. S., Hanoselina, Y., & Syafril, R. (2025). Gaya Kepemimpinan Adaptif Sri Mulyani Indrawati dalam Pengelolaan Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(4), 2277–2288.
- Darumurti, A., Atmojo, M. E., Saputro, M. N. C. E., & Perdana, V. A. (2023). Agile Governance Dalam Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Inovasi Bantul Sehat Ekonomi Karo Jamu). *PERSPEKTIF*, 12(3), 952–960.
- Elza, P. (2025). Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik (JIAKP)*, 1(1), 26–33.
- Hidayat, A. (2025). INOVASI PELAYANAN PUBLIK MULAI E-SAMSAT STUDI DI KOTA MATARAM. *Journal of Applied Economics and Business Global*, 1(1), 30–42.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mustari, N., Sulastris, S., Sulfiyanti, S., & Syukri, U. (2022). Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Makassar Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(2), 82–88.
- Purborini, V. S., & Ramadhan, Z. (2024). ANALISA PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 4871–4878.
- Ramadhan, Z. (2024). DIGITALISASI DALAM PEMERINTAHAN: LANGKAH STRATEGIS PASCA PANDEMI COVID-19. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1353–1361.
- Salsabila, N. N., & Darumurti, A. (2023). Analisis Transformasi Pola Kerja Birokrasi dalam Pelayanan Publik Pasca-Pandemi Covid-19 di Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara

- Yogyakarta. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 9(2).
- Sinaga, R. C., Sunarto, E. P., Hafiz, Z., & Aji, P. (2025). Reformasi Birokrasi Melalui Regenerasi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Transformatif di Era Digital:- *Journal of Social Contemplativa*, 3(2), 114–125.
- Sulastri, S., & Permatasari, A. (2023). Implementasi Konsep Agile Governance dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Transformative*, 9(2), 187–203.
- Yusri, Y., & Jufri, R. R. (2023). Strategi Komunikasi Pimpinan Dalam Penguatan Kapasitas Tatanan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 6(2), 236–241.